NETWORK : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Komputer Sains
Vol. 2, No. 2, April-September 2026
e-ISSN : 3110-1658
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/network

EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN PADA INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA KENDARI

Andi Sulia Sudirman
Universitas Halu Oleo
e-mail: andisulia@uho.ac.id

Diterima: *19/7/2026*; Direvisi: *27/7/2026*; Diterbitkan: *30/7/2026*

ABSTRAK

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut implementasi sistem informasi yang mampu mendukung pelayanan publik secara efektif, efisien, dan terintegrasi. Sistem Informasi Kependudukan berperan strategis sebagai penyedia data kependudukan untuk mendukung pelayanan administrasi dan pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi Sistem Informasi Kependudukan pada instansi pemerintah di Kota Kendari serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif melalui survei pada 14 instansi pemerintah, dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan pengelompokan tema. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 70% instansi telah mengimplementasikan Sistem Informasi Kependudukan dengan kategori baik, didukung oleh digitalisasi layanan, infrastruktur, dan komitmen organisasi. Namun, kendala masih ditemukan pada integrasi data, kapasitas sumber daya manusia, dan mekanisme pencadangan data. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis faktor teknologi, organisasi, dan tata kelola sebagai kerangka evaluasi implementasi Sistem Informasi Kependudukan lintas instansi pemerintah daerah yang dapat menjadi dasar penguatan transformasi digital sektor publik.

Kata Kunci: *Sistem Informasi Kependudukan, Digital Government, Interoperabilitas Data, Tata Kelola Digital, Pelayanan Administrasi Kependudukan.*

ABSTRACT

Digital transformation in public administration requires the implementation of information systems capable of supporting public services effectively, efficiently, and in an integrated manner. The Population Information System plays a strategic role in providing demographic data to support administrative services and decision-making across government institutions. This study aims to evaluate the implementation of the Population Information System in government agencies in Kendari City and identify the factors influencing its successful implementation. The study employed a quantitative descriptive approach through a survey involving 14 government agencies, with data collected using questionnaires, observations, and documentation. The data were analyzed using descriptive statistics and thematic analysis. The findings indicate that more than 70% of the participating agencies have implemented the Population Information System effectively, supported by the digitalization of administrative services, adequate infrastructure, and organizational commitment. However, challenges remain in data integration, human resource capacity, and data backup mechanisms. The novelty of this study lies in developing a synthesis of technological, organizational, and governance factors as an evaluation framework for implementing the Population Information System across local

Copyright (c) 2026 Network : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi dan Komputer Sains
https://doi.org/10.51878/network.v2i2.14186

NETWORK : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Komputer Sains
Vol. 2, No. 2, April-September 2026
e-ISSN : 3110-1658
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/network

government agencies, providing a practical reference for strengthening integrated digital transformation in the public sector.
Keywords: *Population Information System, Digital Government, Data Interoperability, Digital Governance, Population Administration Services.*

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah berkembang menjadi salah satu agenda strategis dalam reformasi administrasi publik di berbagai negara sebagai upaya meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta kemampuan pemerintah merespons dinamika sosial dan ekonomi. Perkembangan teknologi informasi saat ini tidak lagi dipahami sebatas digitalisasi proses administrasi, melainkan sebagai fondasi terbentuknya pemerintahan berbasis data (*data-driven government*), pemerintahan yang adaptif (*agile governance*), serta penciptaan nilai publik (*public value*) melalui pemanfaatan teknologi digital secara terintegrasi (Virtanen & Jalonen, 2024; Tando, 2025; Ferreira & Santos, 2025). Berbagai studi mutakhir menunjukkan bahwa keberhasilan digital government lebih banyak ditentukan oleh kemampuan organisasi membangun interoperabilitas data, tata kelola digital (*digital governance*), koordinasi lintas institusi, serta kompetensi aparatur dibandingkan sekadar investasi pada infrastruktur teknologi (Janssen et al., 2022; Hong et al., 2022; Edelmann et al., 2023; OECD, 2023; United Nations, 2024). Di Indonesia, transformasi GovTech juga menghadapi paradoks antara tingginya ambisi digital pemerintah dengan kesiapan kelembagaan, integrasi kebijakan, serta kapasitas organisasi dalam mengimplementasikan inovasi digital secara berkelanjutan (Fatah & Ngamal, 2025). Oleh karena itu, integrasi sistem informasi menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dalam konteks Indonesia, transformasi digital diwujudkan melalui pengembangan berbagai sistem informasi pemerintahan yang saling terhubung, salah satunya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang berfungsi sebagai sumber utama data kependudukan nasional. Keberadaan SIAK memiliki posisi strategis karena data kependudukan dimanfaatkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga penyelenggara pelayanan publik sebagai dasar perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, dan pemberian layanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 beserta kebijakan Satu Data Indonesia menempatkan data kependudukan sebagai *single source of truth* yang harus akurat, mutakhir, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung interoperabilitas antarinstansi. Penelitian Sarofah et al. (2026) menegaskan bahwa keberhasilan integrasi kebijakan digital sangat bergantung pada interoperabilitas data antarlembaga sehingga mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan berbasis data. Temuan tersebut diperkuat oleh Dewi et al. (2025) dan Susniwati et al. (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi e-government di Indonesia memerlukan sinergi antara tata kelola digital, regulasi, kapasitas organisasi, serta koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, kualitas implementasi Sistem Informasi Kependudukan tidak hanya menentukan kualitas administrasi kependudukan, tetapi juga memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh.

Kebutuhan terhadap implementasi sistem informasi yang andal semakin penting di Kota Kendari seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kompleksitas pelayanan publik. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Kendari (2025), jumlah penduduk pada tahun 2024

Copyright (c) 2026 Network : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi dan Komputer Sains
https://doi.org/10.51878/network.v2i2.14186

NETWORK : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Komputer Sains
Vol. 2, No. 2, April-September 2026
e-ISSN : 3110-1658
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/network

mencapai 366.454 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 4,38%, sehingga kebutuhan terhadap data kependudukan yang cepat, akurat, dan terintegrasi juga semakin meningkat. Selain itu, perkembangan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kota Kendari menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan telah mulai diterapkan pada berbagai sektor, termasuk pengembangan sistem pelaporan berbasis web oleh Badan Pusat Statistik Kota Kendari sebagai bagian dari penguatan tata kelola data pemerintahan (Dwi et al., 2025). Namun demikian, peningkatan kebutuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan seluruh organisasi perangkat daerah dalam memanfaatkan data kependudukan secara optimal sebagai dasar pelayanan, penyusunan program pembangunan, maupun pengambilan keputusan berbasis bukti. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas teknologi, tetapi juga oleh kapasitas aparatur, budaya organisasi, dan kemampuan institusi dalam mengelola data secara kolaboratif (Herwanto et al., 2024; Edelmann et al., 2023).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi kependudukan masih menghadapi tantangan yang kompleks. Aminah et al. (2021) mengidentifikasi bahwa keberhasilan transformasi digital dipengaruhi oleh regulasi, infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, dan budaya organisasi. Tarifu (2020) menemukan bahwa implementasi SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari telah berjalan cukup baik, tetapi masih menghadapi kendala jaringan dan fasilitas pelayanan, sedangkan Mukhsar et al. (2020) melaporkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan kelurahan belum optimal akibat keterbatasan kapasitas aparatur. Penelitian terbaru memperlihatkan bahwa tantangan implementasi sistem informasi telah bergeser dari persoalan teknis menuju penguatan tata kelola digital, interoperabilitas data, analitik big data, kecerdasan buatan, dan kolaborasi lintas organisasi (Hilabi et al., 2025; Mozin et al., 2025; OECD, 2023; World Bank, 2024; United Nations, 2024). Selain itu, Hong et al. (2022) menunjukkan bahwa inovasi digital sektor publik dipengaruhi oleh kepemimpinan, kapasitas organisasi, budaya inovasi, dan dukungan kelembagaan sebagai faktor penentu keberhasilan transformasi digital. Sintesis berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa faktor organisasi, tata kelola data, serta kompetensi aparatur menjadi determinan utama implementasi sistem informasi, namun sebagian besar penelitian masih berorientasi pada instansi penyelenggara layanan dan belum banyak mengevaluasi bagaimana organisasi pengguna memanfaatkan data kependudukan sebagai dasar administrasi pemerintahan dan pengambilan keputusan.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang masih memerlukan perhatian. Sebagian besar studi mengenai implementasi Sistem Informasi Kependudukan lebih banyak mengevaluasi efektivitas operasional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemerintah desa, atau pemerintah kelurahan, sedangkan perspektif organisasi perangkat daerah sebagai pengguna utama data kependudukan belum banyak dikaji secara komprehensif. Padahal, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan penyedia sistem menghasilkan data yang berkualitas, tetapi juga oleh kemampuan instansi pengguna dalam mengakses, mengintegrasikan, menganalisis, dan memanfaatkan data tersebut sebagai dasar penyusunan kebijakan publik. Sarofah et al. (2026) menegaskan bahwa interoperabilitas data merupakan prasyarat utama bagi integrasi kebijakan publik, sementara Peña Pazos et al. (2026) menunjukkan bahwa pendekatan *anticipatory governance* berbasis kecerdasan buatan akan menjadi arah baru administrasi publik dalam mendukung pengambilan keputusan yang adaptif dan prediktif. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan empiris

Copyright (c) 2026 Network : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi dan Komputer Sains
https://doi.org/10.51878/network.v2i2.14186

NETWORK : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Komputer Sains
Vol. 2, No. 2, April-September 2026
e-ISSN : 3110-1658
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/network

mengenai implementasi Sistem Informasi Kependudukan dalam ekosistem pengguna data lintas organisasi perangkat daerah yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi Sistem Informasi Kependudukan pada instansi pemerintah di Kota Kendari serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan evaluasi yang menempatkan organisasi perangkat daerah sebagai pengguna utama data kependudukan, bukan hanya memfokuskan kajian pada penyelenggara layanan administrasi kependudukan. Penelitian ini juga mengembangkan sintesis konseptual yang menghubungkan dimensi teknologi informasi, interoperabilitas data, kapasitas organisasi, kompetensi aparatur, tata kelola digital, serta kolaborasi lintas institusi sebagai kerangka evaluasi implementasi Sistem Informasi Kependudukan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperluas pengembangan teori digital government sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat integrasi data kependudukan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti pada era transformasi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk mengevaluasi implementasi Sistem Informasi Kependudukan pada instansi pemerintah di Kota Kendari. Unit analisis penelitian adalah instansi pemerintah yang memanfaatkan Sistem Informasi Kependudukan dalam mendukung pelayanan administrasi dan pelayanan publik. Penelitian dilaksanakan pada Januari–Maret 2025 dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden yang memiliki kewenangan dan pengalaman dalam pengelolaan maupun pemanfaatan Sistem Informasi Kependudukan pada masing-masing instansi. Sebanyak 14 instansi pemerintah dilibatkan, dengan satu orang responden dari setiap instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan atau pemanfaatan sistem sehingga informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Prosedur penelitian diawali dengan penentuan responden berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan penyusunan instrumen, penyebaran kuesioner, pelaksanaan observasi dan dokumentasi, kemudian dilakukan pengumpulan, verifikasi, dan analisis data.

Instrumen penelitian disusun oleh peneliti berdasarkan indikator implementasi Sistem Informasi Kependudukan yang relevan dengan tujuan penelitian. Instrumen terdiri atas enam indikator, yaitu metode pendataan, infrastruktur sistem informasi, kinerja sistem informasi, sumber daya manusia, kebijakan dan dukungan organisasi, serta tantangan implementasi yang dikembangkan ke dalam pertanyaan tertutup dan terbuka. Sebelum digunakan, instrumen melalui uji validitas isi (*content validity*) oleh dua ahli administrasi publik dan sistem informasi, kemudian diuji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha dengan batas penerimaan ≥0,70 sehingga layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Data dari pertanyaan tertutup dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa distribusi frekuensi dan persentase, sedangkan data dari pertanyaan terbuka dianalisis melalui pengelompokan tema untuk mengidentifikasi tantangan implementasi serta merumuskan rekomendasi penguatan Sistem Informasi Kependudukan pada instansi pemerintah di Kota Kendari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Copyright (c) 2026 Network : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi dan Komputer Sains
https://doi.org/10.51878/network.v2i2.14186

NETWORK : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Komputer Sains
Vol. 2, No. 2, April-September 2026
e-ISSN : 3110-1658
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/network

Penentuan responden dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan maupun pemanfaatan Sistem Informasi Kependudukan pada instansi pemerintah. Pendekatan tersebut dipilih agar data yang diperoleh berasal dari pihak yang memiliki pemahaman terhadap proses operasional, koordinasi antarinstansi, serta implementasi sistem dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan. Keterlibatan berbagai jenjang organisasi pemerintahan memberikan peluang untuk memperoleh sudut pandang yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan sistem informasi pada tingkat pelaksana maupun pengambil keputusan. Karakteristik responden yang dilibatkan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Instansi Pemerintah yang Menjadi Responden Penelitian

No.	Instansi	Jenis Instansi	Jabatan Responden
1	Kelurahan Mokoau	Pemerintah Kelurahan	Kententraman dan Ketertiban Umum
2	Kelurahan Nambo	Pemerintah Kelurahan	Sekretaris
3	Kelurahan Kandai	Pemerintah Kelurahan	Lurah
4	Kecamatan Poasia	Pemerintah Kecamatan	Camat
5	Dinas Sosial Kota Kendari	Pemerintah Kota Kendari	Kabid Penanganan Fakir Miskin
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari	Pemerintah Kota Kendari	Sekretaris Disdukcapil
7	Kelurahan Kemaraya	Pemerintah Kelurahan	Kepala Seksi P2M
8	Kelurahan Anawai	Pemerintah Kelurahan	Sekretaris
9	Kelurahan Anggoeya	Pemerintah Kelurahan	Lurah
10	Kelurahan Andounohu	Pemerintah Kelurahan	Staf
11	Kelurahan Padaleu	Pemerintah Kelurahan	Lurah
12	Kelurahan Baruga	Pemerintah Kelurahan	Lurah
13	Kelurahan Kambu	Pemerintah Kelurahan	Seksi P2M
14	Kelurahan Kadia	Pemerintah Kelurahan	Seksi P2M

Komposisi responden yang berasal dari berbagai unit pemerintahan memungkinkan penelitian menangkap variasi pengalaman dalam penerapan Sistem Informasi Kependudukan pada konteks kelembagaan yang berbeda. Keragaman tersebut mendukung proses analisis karena setiap instansi memiliki fungsi, kewenangan, dan kebutuhan layanan administrasi yang saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Informasi yang diperoleh dari responden diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi implementasi sistem, termasuk faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam praktik. Dengan demikian, data yang terkumpul menjadi dasar yang kuat untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Sistem Informasi Kependudukan serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang relevan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Evaluasi terhadap metode pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pendekatan yang diterapkan oleh instansi pemerintah dalam menghimpun dan mengelola data kependudukan. Analisis ini penting karena metode pendataan yang digunakan akan memengaruhi efisiensi proses administrasi, ketepatan pembaruan data, serta kualitas informasi

Copyright (c) 2026 Network : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi dan Komputer Sains
https://doi.org/10.51878/network.v2i2.14186

NETWORK : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Komputer Sains
Vol. 2, No. 2, April-September 2026
e-ISSN : 3110-1658
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/network

yang dihasilkan untuk mendukung pelayanan publik. Selain itu, identifikasi metode pendataan memberikan dasar dalam menilai tingkat adopsi teknologi digital pada penyelenggaraan administrasi kependudukan di lingkungan pemerintah daerah. Hasil evaluasi metode pendataan yang diterapkan oleh instansi responden disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Metode Pendataan

Aspek yang Diukur	Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Metode pendataan	Kombinasi (digital dan manual)	10	71,4
	Manual	4	28,6
	Jumlah	**14**	**100**

(Sumber : Hasil olahan data penelitian, 2026)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dipahami bahwa proses pendataan kependudukan pada instansi pemerintah telah mengarah pada pemanfaatan sistem yang lebih adaptif melalui integrasi antara mekanisme konvensional dan teknologi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam administrasi kependudukan masih berlangsung secara bertahap sehingga sebagian instansi tetap mempertahankan prosedur manual untuk mendukung kelancaran operasional dan menjamin keakuratan data. Perbedaan pendekatan yang digunakan mencerminkan adanya variasi dalam kesiapan sumber daya, infrastruktur teknologi, serta kebutuhan pelayanan pada masing-masing instansi. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas aparatur, dan harmonisasi prosedur kerja menjadi faktor penting untuk mendukung implementasi Sistem Informasi Kependudukan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Ketersediaan infrastruktur sistem informasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi Sistem Informasi Kependudukan pada instansi pemerintah. Infrastruktur yang memadai tidak hanya mendukung kelancaran operasional sistem, tetapi juga meningkatkan kecepatan akses, keamanan data, serta keberlangsungan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Selain aspek perangkat keras dan jaringan, keberadaan mekanisme pencadangan data (*backup*) menjadi komponen penting dalam menjaga integritas informasi apabila terjadi gangguan teknis atau kehilangan data. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kondisi infrastruktur pendukung dan sistem *backup* diperlukan untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan instansi dalam mendukung implementasi Sistem Informasi Kependudukan.

Tabel 3. Hasil Evaluasi Infrastruktur Sistem Informasi

Aspek yang Diukur	Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Infrastruktur pendukung	Memadai	11	78,6
	Belum memadai	3	21,4
	Jumlah	**14**	**100**
Backup data	Tersedia	8	57,1
	Belum tersedia	6	42,9
	Jumlah	**14**	**100**

(Sumber : Hasil olahan data penelitian, 2026)

Copyright (c) 2026 Network : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi dan Komputer Sains
https://doi.org/10.51878/network.v2i2.14186

NETWORK : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Komputer Sains
Vol. 2, No. 2, April-September 2026
e-ISSN : 3110-1658
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/network

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa kesiapan infrastruktur pada instansi pemerintah secara umum telah mampu mendukung pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan perangkat dan jaringan, tetapi juga pada kemampuan instansi dalam menjamin keamanan serta keberlanjutan pengelolaan data melalui mekanisme pencadangan yang andal. Perbedaan tingkat kesiapan antarinstansi mengindikasikan adanya variasi kapasitas sumber daya, dukungan anggaran, dan prioritas pengembangan teknologi informasi pada masing-masing organisasi. Dengan demikian, peningkatan kualitas infrastruktur digital perlu diikuti oleh penguatan sistem keamanan informasi, standardisasi prosedur *backup* data, serta investasi teknologi yang berkelanjutan agar implementasi Sistem Informasi Kependudukan dapat berlangsung secara lebih optimal, aman, dan berkesinambungan.

Evaluasi kinerja Sistem Informasi Kependudukan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sistem mampu mendukung pelaksanaan administrasi kependudukan secara efektif dan berkelanjutan. Penilaian kinerja tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman pengguna dalam mengoperasikan sistem serta kemampuan sistem dalam menghasilkan informasi yang berkualitas. Analisis terhadap berbagai indikator kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan implementasi sistem sehingga dapat menjadi dasar penyusunan strategi peningkatan kualitas layanan berbasis teknologi informasi. Hasil evaluasi terhadap kinerja Sistem Informasi Kependudukan pada instansi pemerintah disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Evaluasi Kinerja Sistem Informasi

Aspek yang Diukur	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Gangguan Sistem	Sangat sering	3	21,4
	Cukup sering	4	28,6
	Jarang	5	35,7
	Tidak pernah	2	14,3
	Jumlah	**14**	**100**
Kemudahan penggunaan	Sangat mudah	5	35,7
	Cukup mudah	6	42,9
	Sulit	3	21,4
	Jumlah	**14**	**100**
Akurasi data	Ya (data akurat/selalu diperbaharui)	11	78,6
	Cukup	2	14,3
	Tidak	1	7,1
	Jumlah	**14**	**100**
Kepuasan pengguna	Sangat puas	3	21,4
	Cukup puas	9	64,3
	Tidak puas	2	14,3
	Jumlah	**14**	**100**
Integrasi data	Sangat baik	4	28,6
	Baik	5	35,7
	Cukup	3	21,4
	Kurang	2	14,3

Copyright (c) 2026 Network : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi dan Komputer Sains
https://doi.org/10.51878/network.v2i2.14186

NETWORK : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Komputer Sains
Vol. 2, No. 2, April-September 2026
e-ISSN : 3110-1658
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/network

Jumlah	**14**	**100**

(Sumber : Hasil olahan data penelitian, 2026)

Berdasarkan Tabel 4 dapat dipahami bahwa kinerja Sistem Informasi Kependudukan secara umum telah mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi pada instansi pemerintah, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknologi dalam memproses data, tetapi juga oleh stabilitas operasional, kemudahan pemanfaatan, kualitas informasi yang dihasilkan, serta tingkat penerimaan pengguna. Variasi hasil pada setiap indikator mengindikasikan bahwa masing-masing instansi memiliki tingkat kesiapan dan kapasitas yang berbeda dalam mengelola serta memanfaatkan sistem informasi untuk mendukung pelayanan publik. Oleh karena itu, upaya peningkatan kinerja sistem perlu diarahkan pada optimalisasi infrastruktur teknologi, penguatan integrasi data antarinstansi, peningkatan kompetensi pengguna, serta pemeliharaan sistem secara berkala agar kualitas pelayanan administrasi kependudukan semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sumber daya manusia merupakan komponen utama yang menentukan keberhasilan implementasi Sistem Informasi Kependudukan pada instansi pemerintah. Kompetensi aparatur, kecukupan jumlah personel, serta kesempatan untuk mengikuti pengembangan kapasitas berpengaruh terhadap efektivitas pemanfaatan sistem dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan. Evaluasi terhadap aspek sumber daya manusia diperlukan untuk mengetahui tingkat kesiapan organisasi dalam mengoperasikan sistem secara optimal sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penguatan kapasitas aparatur. Hasil penilaian terhadap aspek sumber daya manusia pada instansi pemerintah disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Evaluasi Sumber Daya Manusia

Aspek yang Diukur	Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Pelatihan	Seluruh Staf	3	21,4
	Sebagian Staf	7	50,0
	Tidak ada pelatihan	4	28,6
	Jumlah	**14**	**100**
Pemahaman Staf	Sangat baik	2	14,3
	Cukup baik	8	57,1
	Kurang	4	28,6
	Jumlah	**14**	**100**
Kebutuhan pelatihan tambahan	Ya	9	64,3
	Tidak	5	35,7
	Jumlah	**14**	**100**
Kecukupan jumlah staf	Memadai	8	57,1
	Belum memadai	6	42,9
	Jumlah	**14**	**100**

(Sumber : Hasil olahan data penelitian, 2026)

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung implementasi Sistem Informasi Kependudukan menunjukkan kondisi yang relatif baik, namun masih memerlukan peningkatan pada beberapa aspek. Hasil tersebut

Copyright (c) 2026 Network : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi dan Komputer Sains
https://doi.org/10.51878/network.v2i2.14186

NETWORK : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Komputer Sains
Vol. 2, No. 2, April-September 2026
e-ISSN : 3110-1658
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/network

mengindikasikan bahwa keberhasilan transformasi digital di lingkungan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kompetensi aparatur serta dukungan organisasi dalam mengembangkan kemampuan pengelola sistem secara berkelanjutan. Perbedaan tingkat kesiapan antarinstansi menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas sumber daya manusia masih perlu dilakukan secara lebih merata agar kualitas pengelolaan sistem informasi dapat ditingkatkan di seluruh unit kerja. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelatihan yang berkesinambungan, peningkatan kompetensi teknis aparatur, penyesuaian kebutuhan jumlah personel, serta penguatan budaya kerja berbasis digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi Sistem Informasi Kependudukan dan kualitas pelayanan publik.

Keberhasilan implementasi Sistem Informasi Kependudukan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknologi dan sumber daya manusia, tetapi juga oleh dukungan kebijakan serta komitmen kelembagaan dalam pelaksanaannya. Kebijakan yang jelas berfungsi sebagai landasan operasional untuk mengarahkan penerapan sistem agar berjalan sesuai dengan tujuan organisasi dan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk regulasi, pendanaan, maupun pembinaan teknis, menjadi faktor penting untuk menjamin keberlanjutan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap aspek kebijakan dan dukungan kelembagaan dilakukan untuk mengetahui tingkat kesiapan organisasi dalam mendukung implementasi Sistem Informasi Kependudukan secara berkelanjutan.

Tabel 6. Hasil Evaluasi Kebijakan dab Dukungan

Aspek yang Diukur	Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Kebijakan yang mendukung implementasi sistem	Ya	10	71,4
	Tidak	4	28,6
	Jumlah	**14**	**100**
Dukungan pemerintah/pusat	Ya	12	85,7
	Tidak	2	14,3
	Jumlah	**14**	**100**

(Sumber : Hasil olahan data penelitian, 2026)

Berdasarkan Tabel 6 dapat dipahami bahwa implementasi Sistem Informasi Kependudukan telah memperoleh dukungan kelembagaan yang relatif baik, meskipun masih terdapat beberapa instansi yang memerlukan penguatan dari sisi kebijakan maupun fasilitasi pelaksanaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan implementasi sistem apabila tidak diikuti dengan dukungan yang konsisten dalam aspek pembinaan, koordinasi, dan penyediaan sumber daya. Perbedaan tingkat dukungan antarinstansi juga mengindikasikan perlunya harmonisasi kebijakan agar penerapan Sistem Informasi Kependudukan dapat berlangsung secara lebih seragam dan efektif pada seluruh tingkat pemerintahan. Dengan demikian, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyempurnaan kebijakan operasional, serta peningkatan koordinasi lintas instansi menjadi langkah strategis untuk mendukung implementasi Sistem Informasi Kependudukan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Selain mengevaluasi aspek kuantitatif, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi instansi pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem Informasi

Copyright (c) 2026 Network : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi dan Komputer Sains
https://doi.org/10.51878/network.v2i2.14186

NETWORK : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Komputer Sains
Vol. 2, No. 2, April-September 2026
e-ISSN : 3110-1658
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/network

Kependudukan melalui analisis terhadap jawaban terbuka responden. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang belum sepenuhnya dapat dijelaskan melalui data kuantitatif. Hasil identifikasi kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema berdasarkan kesamaan karakteristik permasalahan sehingga memudahkan proses interpretasi dan penyusunan rekomendasi. Ringkasan tema-tema tantangan implementasi Sistem Informasi Kependudukan yang ditemukan selama penelitian disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Tema Tantangan Implementasi Sistem Informasi Kependudukan

Tema Tantangan	Frekuensi Kemunculan
Keterbatasan jaringan/internet	6
Keterbatasan SDM dan pelatiha	6
Keterbatasan infrastruktur/sarana prasarana	5
Keterbatasan anggaran	2
Sinkronisasi dan integrasi data	2
Permasalahan masyarakat/pengguna layanan	5

(Sumber : Hasil olahan data penelitian, 2026)

Berdasarkan Tabel 7 dapat dipahami bahwa tantangan implementasi Sistem Informasi Kependudukan tidak hanya berasal dari faktor teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek organisasi, ketersediaan sumber daya, serta karakteristik pengguna layanan. Keberagaman tema yang teridentifikasi menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi memerlukan pendekatan yang bersifat menyeluruh karena setiap faktor saling berkaitan dalam memengaruhi efektivitas pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa upaya perbaikan tidak cukup difokuskan pada peningkatan teknologi semata, melainkan perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas aparatur, penyediaan sumber daya yang memadai, serta peningkatan koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, penyusunan strategi pengembangan Sistem Informasi Kependudukan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi tata kelola data, serta penguatan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar implementasi sistem dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari identifikasi berbagai tantangan implementasi, penelitian ini juga menghimpun masukan dari responden mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas Sistem Informasi Kependudukan. Rekomendasi tersebut diperoleh melalui analisis terhadap jawaban terbuka yang kemudian dikelompokkan berdasarkan kesamaan substansi agar mencerminkan prioritas kebutuhan pengembangan sistem. Pendekatan ini memberikan gambaran mengenai upaya perbaikan yang dipandang paling relevan oleh para pelaksana yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi. Hasil pengelompokan tema rekomendasi peningkatan implementasi Sistem Informasi Kependudukan disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Tema Rekomendasi Peningkatan Implementasi Sistem Informasi

Tema Rekomendasi	Frekuensi Kemunculan
Peningkatan pelatihan SDM	7
Penyediaan sarana dan prasarana	5
Penguatan jaringan dan infrastruktur	4
Integrasi dan sinkronisasi data	4

Copyright (c) 2026 Network : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi dan Komputer Sains
https://doi.org/10.51878/network.v2i2.14186

NETWORK : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Komputer Sains
Vol. 2, No. 2, April-September 2026
e-ISSN : 3110-1658
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/network

Edukasi kepada masyarakat	3
Dukungan anggaran	2

(Sumber : Hasil olahan data penelitian, 2026)

Berdasarkan Tabel 8 dapat dipahami bahwa rekomendasi yang disampaikan responden mencakup berbagai aspek yang saling melengkapi, mulai dari penguatan kapasitas organisasi, pengembangan teknologi, hingga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keragaman rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa penyempurnaan implementasi Sistem Informasi Kependudukan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan tidak hanya berfokus pada satu dimensi pengembangan. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa keberhasilan transformasi digital di lingkungan pemerintahan sangat bergantung pada sinergi antara pengembangan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, tata kelola data yang terintegrasi, serta komitmen kelembagaan dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun program penguatan implementasi Sistem Informasi Kependudukan secara bertahap, terarah, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan efektivitas tata kelola administrasi kependudukan serta kualitas pelayanan publik.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Kependudukan pada instansi pemerintah di Kota Kendari telah mencerminkan proses transformasi menuju *digital government*, meskipun implementasinya masih berada pada fase transisi. Kondisi tersebut terlihat dari pemanfaatan sistem digital yang masih dipadukan dengan prosedur administrasi manual pada beberapa jenis layanan yang memerlukan verifikasi dokumen fisik maupun penyesuaian terhadap ketentuan administratif. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan adopsi teknologi, tetapi juga merupakan proses perubahan tata kelola organisasi, prosedur kerja, serta budaya birokrasi menuju pemerintahan yang lebih adaptif. Pandangan tersebut sejalan dengan Fatah dan Ngamal (2025) yang menjelaskan bahwa transformasi GovTech di Indonesia masih menghadapi paradoks antara ambisi digital pemerintah dengan kesiapan organisasi dan tata kelola kelembagaan. Selain itu, Ferreira dan Santos (2025) menegaskan bahwa transformasi digital sektor publik merupakan proses multidimensional yang mencakup perubahan strategi organisasi, proses bisnis, sumber daya manusia, dan inovasi pelayanan publik. Hadi dan Widnyani (2024) juga menambahkan bahwa keberhasilan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memerlukan harmonisasi kebijakan, integrasi layanan, dan kesiapan kelembagaan agar digitalisasi mampu menghasilkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi Sistem Informasi Kependudukan perlu dipahami sebagai bagian dari reformasi administrasi publik yang berkembang secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan masing-masing organisasi pemerintah.

Interpretasi tersebut sejalan dengan konsep *digital government* yang dikemukakan oleh Gil-Garcia et al. (2018), namun memperoleh penguatan dari berbagai kajian mutakhir mengenai tata kelola digital. OECD (2023) dan United Nations (2024) menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintahan tidak lagi diukur dari banyaknya layanan yang telah terdigitalisasi, melainkan dari kemampuan pemerintah membangun interoperabilitas data, kolaborasi lintas instansi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan Sistem Informasi Kependudukan telah mendukung pelayanan administrasi dan

Copyright (c) 2026 Network : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi dan Komputer Sains
https://doi.org/10.51878/network.v2i2.14186

NETWORK : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Komputer Sains
Vol. 2, No. 2, April-September 2026
e-ISSN : 3110-1658
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/network

pemanfaatan data kependudukan oleh berbagai organisasi perangkat daerah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variasi kesiapan infrastruktur, mekanisme pencadangan data, dan integrasi informasi masih menjadi tantangan dalam optimalisasi sistem. Temuan ini selaras dengan Sarofah et al. (2026) yang menekankan pentingnya integrasi kebijakan digital melalui interoperabilitas data antarlembaga, serta Saepudin et al. (2025) yang menyatakan bahwa implementasi Satu Data Indonesia menjadi fondasi utama dalam meningkatkan transparansi, konsistensi, dan aksesibilitas data publik. Buyannemekh et al. (2023) turut menjelaskan bahwa kolaborasi lintas organisasi merupakan faktor kunci dalam membangun ekosistem transformasi digital pada pemerintah daerah sehingga manfaat sistem informasi dapat dirasakan secara lebih luas.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Sistem Informasi Kependudukan dipengaruhi oleh keterkaitan antara infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, kebijakan organisasi, dan kualitas tata kelola data. Ketersediaan perangkat teknologi belum secara otomatis menghasilkan implementasi yang efektif apabila tidak didukung oleh aparatur yang memiliki kompetensi memadai serta kebijakan organisasi yang mampu mengatur pemanfaatan sistem secara konsisten. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan sistem informasi merupakan hasil interaksi berbagai faktor organisasi yang saling memengaruhi. Pandangan ini sejalan dengan World Bank (2024) yang menegaskan bahwa pembangunan *digital public infrastructure* harus diikuti oleh penguatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia agar mampu menghasilkan pelayanan publik yang adaptif dan berkelanjutan. Edelmann et al. (2023) serta Sarjito dan Djati (2025) juga menunjukkan bahwa kompetensi digital aparatur sipil negara merupakan prasyarat utama keberhasilan reformasi birokrasi digital karena menentukan kemampuan organisasi dalam mengadopsi inovasi teknologi. Temuan tersebut diperkuat oleh Firlana (2025) yang menjelaskan bahwa transformasi digital membawa perubahan mendasar terhadap manajemen sumber daya manusia sektor publik sehingga diperlukan strategi pengembangan kompetensi yang berkesinambungan agar organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memiliki persamaan sekaligus perbedaan yang memberikan kontribusi ilmiah. Aminah et al. (2021), Tarifu (2020), dan Mukhsar et al. (2020) sama-sama menegaskan bahwa infrastruktur, kompetensi aparatur, dan dukungan organisasi merupakan faktor penting dalam implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada instansi penyelenggara layanan administrasi kependudukan atau pemerintah tingkat kelurahan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengevaluasi implementasi Sistem Informasi Kependudukan dari perspektif berbagai instansi pemerintah sebagai pengguna data kependudukan. Perspektif tersebut sejalan dengan Dewi et al. (2025) yang menekankan bahwa evaluasi e-government perlu memperhatikan kapasitas organisasi pengguna dalam memanfaatkan sistem digital, bukan hanya menilai keberhasilan penyedia layanan. Selain itu, Sari dan Putri (2024) menunjukkan bahwa implementasi e-government di pemerintah daerah dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan sistem informasi dengan kebutuhan pelayanan publik. Dengan demikian, efektivitas implementasi sistem tidak hanya ditentukan oleh kualitas penyedia layanan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi pengguna dalam mengakses, mengintegrasikan, serta memanfaatkan data kependudukan sebagai dasar pelayanan publik dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa tantangan implementasi Sistem Informasi Kependudukan masih bersifat multidimensional karena mencakup aspek teknologi,

Copyright (c) 2026 Network : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi dan Komputer Sains
https://doi.org/10.51878/network.v2i2.14186

organisasi, sumber daya manusia, dan tata kelola data. Keterbatasan jaringan internet, belum optimalnya interoperabilitas data, kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur, serta belum meratanya dukungan kebijakan internal menunjukkan bahwa transformasi digital memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif daripada sekadar pengembangan aplikasi. Kondisi tersebut selaras dengan OECD (2023), United Nations (2024), dan Janssen et al. (2022) yang menempatkan interoperabilitas data sebagai fondasi utama *digital governance* karena memungkinkan kolaborasi antarlembaga dan memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti. Hiqmah et al. (2023) menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi *big data* pada pemerintahan Indonesia masih menghadapi tantangan integrasi data, keamanan informasi, dan kesiapan organisasi. Achmad dan Achmad (2025) menjelaskan bahwa penerapan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam e-government berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik apabila didukung tata kelola data yang baik, sedangkan Criado et al. (2025) menegaskan bahwa implementasi AI dalam administrasi publik harus disertai kerangka tata kelola, regulasi, dan akuntabilitas yang jelas. Oleh karena itu, peningkatan implementasi Sistem Informasi Kependudukan perlu diarahkan pada penguatan integrasi data, standardisasi tata kelola informasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta koordinasi lintas perangkat daerah.

Kontribusi ilmiah (novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif evaluasi implementasi Sistem Informasi Kependudukan yang tidak hanya menilai kesiapan penyelenggara layanan administrasi kependudukan, tetapi juga mengevaluasi kesiapan instansi pengguna data lintas perangkat daerah sebagai bagian dari ekosistem *digital government*. Temuan penelitian menghasilkan sintesis bahwa efektivitas implementasi Sistem Informasi Kependudukan dibangun melalui hubungan yang saling memperkuat antara infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dukungan organisasi, interoperabilitas data, tata kelola digital, dan kolaborasi antarlembaga. Sintesis ini memperluas kajian implementasi sistem informasi sektor publik yang selama ini lebih berorientasi pada aspek teknis dengan menempatkan organisasi pengguna sebagai aktor utama dalam pemanfaatan data kependudukan. Sejalan dengan Zhang et al. (2026), perkembangan *digital government* akan menghasilkan efek jaringan data (*data network effects*) yang mampu mendorong inovasi digital dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan apabila didukung oleh ekosistem data yang terintegrasi. Selain itu, Peña Pazos et al. (2026) menunjukkan bahwa arah pengembangan administrasi publik ke depan mengarah pada *anticipatory governance* yang mengintegrasikan interoperabilitas data, kecerdasan buatan, dan analitik prediktif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi transformasi digital, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan literatur mengenai implementasi *digital government*, tata kelola data sektor publik, dan evaluasi pemanfaatan data lintas organisasi pemerintah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Sistem Informasi Kependudukan tidak semata-mata ditentukan oleh tersedianya teknologi informasi, tetapi merupakan hasil sinergi antara kesiapan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, tata kelola organisasi, dan interoperabilitas data antarinstansi. Temuan tersebut mengonfirmasi bahwa transformasi menuju *digital government* memerlukan pendekatan yang bersifat menyeluruh, yaitu mengintegrasikan aspek teknologi, kelembagaan, dan pengelolaan data dalam satu ekosistem pelayanan publik. Penelitian ini sekaligus mengisi kesenjangan penelitian

Copyright (c) 2026 Network : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi dan Komputer Sains
https://doi.org/10.51878/network.v2i2.14186

sebelumnya yang lebih banyak mengevaluasi implementasi Sistem Informasi Kependudukan dari sisi penyelenggara layanan administrasi kependudukan, dengan menghadirkan perspektif baru melalui evaluasi pada instansi pengguna data lintas perangkat daerah. Kontribusi ilmiah tersebut memperluas kajian mengenai implementasi sistem informasi sektor publik dengan menempatkan organisasi pengguna sebagai bagian penting dalam keberhasilan *digital governance* dan pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik serta pengambilan keputusan berbasis bukti.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi transformasi digital yang tidak hanya berorientasi pada penguatan infrastruktur teknologi, tetapi juga pada peningkatan interoperabilitas data, standardisasi tata kelola digital, pengembangan kompetensi aparatur, dan penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem informasi kependudukan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Selain memberikan implikasi praktis, penelitian ini juga memperkaya pengembangan teori *digital government* dan *digital governance* melalui penegasan bahwa efektivitas implementasi sistem informasi publik dipengaruhi oleh keterpaduan antara aspek teknologi, organisasi, dan tata kelola data. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah penelitian serta menggunakan pendekatan analitis atau pemodelan kausal untuk menguji hubungan antarvariabel sehingga diperoleh model implementasi Sistem Informasi Kependudukan yang dapat digeneralisasikan pada berbagai konteks pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, F. Y. N., & Achmad, M. G. N. (2025). Artificial Intelligence Driven E-Government (Model Transformasi Pelayanan Publik Digital Di Pemerintahan Daerah). *Jurnal Mahandia*, *9*(2), 60-71. https://doi.org/10.5281/vn0v1p02

Buyannemekh, B., Gil-Garcia, J. R., & Gascó-Hernández, M. (2023). Exploring emergent collaborations for digital transformation in local governments: The engagement of public libraries in the development of smart cities. *Public Policy and Administration*. https://doi.org/10.1177/09520767231197600

Criado, J. I., Sandoval-Almazán, R., & Gil-Garcia, J. R. (2025). Artificial intelligence and public administration: Understanding actors, governance, and policy from micro, meso, and macro perspectives. *Public Policy and Administration*, *40*(2), 173-184. https://doi.org/10.1177/09520767241272921

Dewi, E. K., Muhaemin, Y., Sitompul, G. A., Parinduri, R. Y., & Rika, M. (2025). Digital Transformation in Public Services: Evaluation of E-Government Implementation in Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *3*(4), 1-8. https://doi.org/10.5281/zenodo.17475222

Dwi, D. O. R. R., Putri, M. M., & Sisilia, A. (2025). Sistem Informasi Pelaporan Pendataan Lapangan Berbasis Web Badan Pusat Statistik Kota Kendari. *Jurnal Teknologi informasi dan Ilmu Komputer*, *1*(3), 113-119. https://doi.org/10.65258/jutekom.v1.i3.15

Edelmann, N., Mergel, I., & Lampoltshammer, T. (2023). Competences that foster digital transformation of public administrations: an Austrian case study. *Administrative Sciences*, *13*(2), 44. https://doi.org/10.3390/admsci13020044

Copyright (c) 2026 Network : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi dan Komputer Sains
https://doi.org/10.51878/network.v2i2.14186

Fatah, M., & Ngamal, Y. (2025). Transformasi GovTech Indonesia dan Paradoks Ambisi Digital. *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam*, *10*(2), 1-21. https://doi.org/10.31538/altsiq.v10i2.7882

Ferreira, A., & Santos, C. (2025). Digital transformation in public sector: Systematic literature review. *Enhancing public sector accountability and services through digital innovation*, 265-288. https://www.igi-global.com/chapter/digital-transformation-in-public-sector/381766

Firlana, H. (2025). Dampak transformasi digital terhadap manajemen sumber daya manusia di sektor publik Indonesia: The impact of digital transformation on human resource management in Indonesian public sector. *Tematics: Technology Management And Informatics Research Journals*, *7*(1), 49-59. https://doi.org/10.52617/tematics.v7i1.714

Hadi, I., & Widnyani, I. A. P. S. (2024). Modernisasi dan Digitalisasi Public Servis: Mewujudkan Indonesia Emas Melalui Harmonisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi*, *6*(02), 639-658. https://doi.org/10.53863/kst.v6i02.1398

Herwanto, T. S., Rohmansyah, H., Daga, A. K., & Roflebabin, B. G. (2024). Kompetensi aparatur sipil negara di era digital sebuah kerangka konseptual. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, *15*(02), 201-209. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i02.6582

Hilabi, S. S., Savina, S., & Khairunisa, S. (2025). Pemanfaatan Data Analitik dalam Big Data: Studi Kasus Implementasi di Pemerintahan. *JATISI*, *12*(1). https://doi.org/10.35957/jatisi.v12i1.10916

Hiqmah, I., Mellenia, D., & Fadila, U. (2023). Implementasi Teknologi Big Data Di Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Jawara Sistem Informasi*, *1*(1). https://ejournal.universitasmandiri.ac.id/index.php/jsi/article/view/25

Hong, S., Kim, S. H., & Kwon, M. (2022). Determinants of digital innovation in the public sector. *Government Information Quarterly*, *39*(4), 101723. 10.1016/j.giq.2022.101723

Mozin, S. Y., Abdullah, S., & Sawali, N. (2025). Pemanfaatan Teknologi Cerdas Untuk Pelayanan Publik: Study Tentang e-Government Dan Smart City Berbasis ICT Big Data Dan AI. *JPS: Journal of Publicness Studies*, *2*(2), 117-130. https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps/en/article/view/1948

Peña Pazos, G. L., Fernández Miranda, M., García Panta, E. E., Zeta Vite, A., Córdova de Chang, M., Chang Valdiviezo, J. H., Gonzales Vera, J. F., & Jurado Rosas, A. A. (2026). Anticipatory Governance and Artificial Intelligence: A Systematic Mapping and Research Agenda for Public Administration. *Administrative Sciences*, *16*(7), 326. https://doi.org/10.3390/admsci16070326

Saepudin, E. A., Solehatunnisa, F., Lestari, N. A., Gunawan, R. A. V., & Fadilah, S. (2025). Implementasi Satu Data Indonesia dalam Mendukung Transparansi dan Akses Data Publik. *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(3), 442-452. https://doi.org/10.63822/pydk5v51

Sari, L., & Putri, H. (2024). Analisis Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pemerintahan Daerah Kepulauan Riau. *Repeater: Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan*, *2*(2), 16-19. https://doi.org/10.62951/repeater.v2i2.42

Sarjito, A., & Djati, S. P. (2025). Implikasi kompetensi digital aparatur sipil negara milenial terhadap reformasi birokrasi digital di era transformasi pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, *21*(1), 87-109. https://doi.org/10.52316/jap.v21i1.610

Copyright (c) 2026 Network : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi dan Komputer Sains
https://doi.org/10.51878/network.v2i2.14186

Sarofah, R., Ramdhani, H., & Firmadi, S. (2026). Digital Policy Integration for Poverty Reduction: Leveraging e-Government and Data Interoperability. *Journal Public Policy*, *12*(1), 31-40. https://doi.org/10.35308/jpp.v12i1.12859

Susniwati, S., Ardiyansah, A., & Sukorina, D. (2025). Good governance di era digital: Studi kasus implementasi e-government di Indonesia. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, *8*(1), 220-234. https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.277

Tando, C. E. (2025). Analysis of Trends, Methods, Challenges, and Future Research in Agile Governance. *Thammasat Review*, *28*(2), 337-373. https://sc01.tci-thaijo.org/index.php/tureview/article/view/241274

Virtanen, P., & Jalonen, H. (2024). Public value creation mechanisms in the context of public service logic: an integrated conceptual framework. *Public Management Review*, *26*(8), 2331-2354. https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2268111

Zhang, Z., Cao, J., He, Q., & Jin, T. (2026). How digital government development drives corporate digital innovation: the new role of data network effects theory. *Industry and Innovation*, 1-27. https://doi.org/10.1080/13662716.2026.2630354

Copyright (c) 2026 Network : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi dan Komputer Sains
https://doi.org/10.51878/network.v2i2.14186